

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Turki merupakan sebuah negara trans benua yang sebagian wilayahnya terletak di Benua Eropa dan bagian yang lain terletak di Benua Asia. Sebelumnya, negara yang ibukotanya terletak di Ankara ini merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman yang berkuasa selama 624 tahun. Namun sejak tanggal 29 Oktober 1923 Kekaisaran Ottoman mengalami keruntuhan dan Turki berubah menjadi negara modern yang mengadopsi sistem sekuler.

Wilayah Turki bagian barat berbatasan dengan Laut Aegea dan Laut Marmara dan merupakan wilayah pertanian yang subur serta menghasilkan kapas, tembakau dan kismis. Sementara itu, wilayah Turki bagian Timur yang berbatasan dengan Asia Tengah, Iran dan Iraq merupakan wilayah bergunung. Suku Kurdi merupakan kelompok minoritas yang cukup diperhitungkan di Turki. Suku ini kebanyakan menetap di Diyarbakir, Anatolia Tenggara. (Harris, 1980)

Penduduk Turki mayoritas beragama Islam, akan tetapi selama bertahun-tahun kebijakan luar negeri Turki sangat berkiblat ke barat, bahkan Turki sempat memiliki kedekatan dengan AS, Eropa dan Israel. Namun, sejak Partai AKP (*Adelet ve Kalkinma Partisi*) berkuasa pada tahun 2002, kebijakan luar negeri Turki mulai berubah. Garis besar kebijakan tersebut dijabarkan dalam *Stratejik Derinlik*, sebuah doktrin kebijakan luar negeri yang diusulkan oleh mantan Menteri Luar Negeri Turki, Ahmed Davutoglu. Doktrin tersebut menganjurkan agar Turki meningkatkan hubungan baik dengan negara-negara tetangga, seperti negara-negara Balkan dan Asia Tengah. Davutoglu juga menyarankan agar Turki memperbaiki hubungan luar negeri dengan Timur Tengah, khususnya Iraq, Iran, Syria, Lebanon, Jordan, Mesir, dan negara-negara Teluk. Menurut Davutoglu, sangat penting bagi Turki untuk memiliki kerjasama ekonomi yang kuat dengan negara-negara tetangga mengingat saat ini fenomena

interdependensi ekonomi semakin berkembang. Untuk itu, saat ditunjuk menjadi menteri luar negeri Turki pada tahun 2009, Ahmed Davutoglu mengeluarkan kebijakan *zero problem with neighbors*. (Murinson, 2012)

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa Turki di bawah kepemimpinan AKP berupaya memperbaiki hubungan kerjasama dengan negara-negara Timur Tengah, salah satunya adalah Iraq. Iraq merupakan salah satu partner dagang yang sangat penting untuk Turki. Wilayah Iraq yang kaya dengan sumber daya alam menjadikannya sebagai sumber energi utama untuk mencukupi kebutuhan energi Turki. Oleh karena itu, Turki sangat memperhatikan hubungan bilateralnya dengan Iraq dan menganggap stabilitas keamanan di Iraq adalah hal yang sangat penting. Hal ini menyebabkan Turki menjadi proaktif meningkatkan interaksinya dengan Iraq seperti mempererat hubungan perdagangan dan investasi, serta meningkatkan komunikasi antar elite politik kedua negara. (Turunc, 2011)

Perkembangan hubungan bilateral Turki dan Iraq terlihat dari kunjungan bilateral yang dilakukan oleh pemerintahan kedua negara. Pada Juli 2008, Recep Tayyip Erdogan yang saat itu masih menjabat sebagai Perdana Menteri Turki melakukan kunjungan ke Iraq. Kunjungan tersebut menghasilkan persetujuan dengan Perdana Menteri Iraq saat itu, Nouri al-Maliki untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Sementara itu, pada tahun 2010 PM al-Maliki melakukan kunjungan ke Turki untuk meminta bantuan terkait upayanya membentuk pemerintahan setelah pemilu Iraq dilaksanakan. (Turunc, 2011)

Pada tahun 2008 HLSC (*High Level Strategic Cooperation Council*) didirikan oleh pemerintah Turki dan Iraq. Kemudian pada tahun berikutnya diadakan pertemuan pertama HLSC yang menghasilkan sebanyak 48 MoU. Pertemuan kedua HLSC dilaksanakan pada tahun 2014 yang membicarakan deklarasi bersama terkait pentingnya kerjasama antar dua negara. Hal tersebut merupakan upaya untuk menciptakan kerjasama jangka panjang antara Turki dan Iraq.

Iraq adalah negara tujuan ekspor Turki yang terbesar. Pada tahun 2015, jumlah ekspor Turki ke Iraq mencapai 8,56 milyar dollar Amerika. Dalam membina hubungan dengan Iraq, Turki berupaya untuk turut menjaga integritas dan keamanan serta stabilitas Iraq. (Republic of Turkey Mistry of Foreign Affairs, 2016)

Pemerintah Turki juga berupaya untuk membina hubungan baik dengan pemerintahan Kurdi di Iraq atau yang lebih dikenal dengan sebutan KRG (*Kurdistan Regional Government*). KRG atau *Kurdistan Regional Government* merupakan institusi utama di pemerintahan wilayah Kurdistan bersama dengan dua institusi lainnya yaitu *Kurdistan Region Presidency* dan *Kurdistan National Assembly*. Berdasarkan konstitusi Iraq, pemerintahan regional Kurdistan memiliki otonomi khusus dan kewenangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif termasuk mengalokasikan anggaran wilayah, mengeluarkan kebijakan terkait keamanan, pendidikan dan kesehatan, mengatur sumber daya alam serta melaksanakan pembangunan infrastruktur. Ibukota *Kurdistan Region* terletak di Kota Erbil dan wilayahnya meliputi tiga provinsi di Iraq, yaitu Dohuk, Erbil dan Sulaymaniyah serta beberapa wilayah di Provinsi Nineveh. *Kurdistan Region* juga memiliki pasukan militer sendiri yang dikenal dengan nama Peshmerga. Sejak tahun 2005 sampai 2017 wilayah ini dipimpin oleh Presiden Mahmoud Barzani, namun saat ini belum diadakan pemilihan untuk memutuskan pengganti Barzani. (UK Border Agency, 2009)

Pada tahun 2014 kondisi domestik Iraq mengalami kekacauan dan konflik disebabkan oleh munculnya kelompok ISIS. Kelompok yang membai'at Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai khalifah tersebut mengklaim berdirinya Negara Islam di Iraq dan Syria. Pasca munculnya kelompok ISIS, banyak kota-kota di Iraq yang kemudian direbut oleh kelompok tersebut, seperti Sinjar, Ramadi, Fallujah, Tikrit, Samarra, Kirkuk, Baiji, Khalis, Diyala, Tal Afar, dan Mosul.

Sebagai respon atas pergerakan kelompok ISIS di Iraq, pemerintah kemudian melakukan upaya-upaya militer untuk merebut kembali kota-kota yang dikuasai oleh ISIS. Namun, diantara kota-kota yang hendak direbut kembali oleh pemerintah Iraq, Mosul merupakan kota yang memiliki nilai cukup penting. Mosul adalah pusat dari Provinsi Nineveh dan kota terbesar kedua di Iraq. Kota ini berhasil direbut oleh ISIS pada tanggal 10 Juni 2014. Untuk membebaskan Mosul dari penguasaan ISIS, sejak tahun 2015 pemerintah Iraq mulai merencanakan dan mengupayakan sebuah operasi militer yang disebut dengan *We Are Coming Nineveh Operation* atau Operasi Pembebasan Mosul. (Assi, 2016)

Operasi Pembebasan Mosul dapat dikatakan memiliki nilai strategis yang penting baik secara politik, militer, geografis maupun sosial. Mosul merupakan sebuah kota kuno bagi orang-orang Asiria dan memiliki banyak peninggalan sejarah serta pusat dari identitas negara Iraq. Selain itu, Mosul adalah kota industri di Iraq utara yang menjadi kunci utama dalam aktivitas perdagangan dengan Turki dan Syria. Berjarak sekitar 400 km dari Baghdad juga menjadikan kota ini strategis karena dekat dengan ibukota. Posisi strategis tersebut ditambah dengan adanya ladang-ladang minyak di Mosul yang memiliki cadangan minyak ribuan juta barel. (Telegraph, 2016)

Hal tersebut menyebabkan pemerintah Iraq mempersiapkan kekuatan yang besar untuk merebut kembali Kota Mosul, bahkan upaya merebut Kota Mosul seringkali disebut sebagai *The Mother of all Battle*. Banyak aktor yang dilibatkan oleh pemerintah ataupun ingin terlibat dalam operasi tersebut, diantaranya pemerintah Iraq yang akan dibantu oleh pasukan Syiah, pejuang suku-suku Sunni, Iran yang bertindak sebagai penasehat pemerintah Iraq dalam operasi, sayap militer KRG atau yang dikenal dengan nama Peshmerga, Amerika Serikat, Turki dan kelompok PKK (*Partiya Karkeren Kurdistan*). (Assi, 2016)

Turki sebenarnya tidak dilibatkan oleh pemerintah Iraq dalam operasi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Turki

berupaya agar dapat terlibat dalam operasi meskipun tidak secara langsung. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Turki adalah bekerjasama dan memberikan bantuan militer kepada kelompok KRG dan kelompok *Nineveh Guard*. Terdapat setidaknya 500 tentara Turki yang memberikan pelatihan militer kepada KRG dan pasukan Sunni di wilayah Bashiqa. (Bora, 2016)

Keterlibatan Turki tersebut ternyata menimbulkan ketegangan dengan pemerintah Iraq. Hal ini dikarenakan pemerintah Iraq menolak bantuan dan keterlibatan Turki dalam Operasi Pembebasan Mosul. Penolakan dari pemerintah Iraq sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2015, namun pemerintah Turki tetap berupaya mengirimkan pasukannya ke wilayah Iraq utara. Sebuah sumber dari Reuters menyebutkan bahwa beberapa minggu sebelum Operasi Pembebasan Mosul dilaksanakan, parlemen Turki memutuskan untuk memperpanjang penempatan sekitar 2000 pasukannya di Iraq utara dengan alasan untuk memerangi organisasi teroris. Menanggapi keputusan parlemen Turki tersebut, pada Bulan Oktober 2016 pemerintah Iraq telah memanggil duta besar Turki serta meminta UNSC (*United Nations Security Council*) untuk mengadakan pertemuan darurat. (Reuters, 2016)

Upaya pemerintah Turki yang tetap berupaya mengirimkan senjata dan pasukan ke wilayah Iraq utara tanpa izin dari pemerintah Iraq telah melanggar kedaulatan Iraq dan mencederai hubungan bilateral kedua negara. Selain itu, keputusan Turki tersebut bertentangan dengan politik luar negerinya di bawah pemerintahan AKP, yaitu "*Zero problems with neighbors*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis ambil yaitu **“Mengapa Turki tetap berupaya untuk terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul meskipun ditentang oleh Iraq ?”**

### C. Kerangka Pemikiran

Hubungan antar negara bangsa di dunia ini sangat dipengaruhi dengan kebijakan luar negeri suatu negara. Biasanya suatu negara mengambil kebijakan luar negeri untuk merespon terhadap berbagai situasi dan fenomena di luar wilayah negaranya terutama yang berpotensi memiliki dampak bagi negara. Untuk melakukan analisis terhadap kebijakan luar negeri Turki yang tetap berupaya untuk terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul di Iraq penulis menggunakan **Teori Kebijakan Luar Negeri** oleh K.J. Holsti.

Kebijakan luar negeri adalah keputusan pemerintah suatu negara yang diperuntukkan untuk negara lain dengan maksud mencapai kepentingan nasional negara. Proses pembuatan kebijakan luar negeri memiliki keterkaitan dengan kebijakan domestik. Henry Kissinger, seorang politikus Amerika Serikat, menyebutkan "*foreign policy begins when domestic policy ends*", yang berarti proses pembuatan kebijakan luar negeri selalu mempertimbangkan aspek domestik dan aspek internasional. Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri adalah sikap dan aktivitas negara yang dilakukan untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternal negara. Sebuah kebijakan luar negeri dilakukan oleh suatu negara dengan maksud untuk melindungi dan mempertahankan kelangsungan hidup negara. (Yani, 2014)

Sementara itu, K.J. Holsti menjabarkan kebijakan luar negeri sebagai seperangkat tindakan dan gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan suatu negara untuk memecahkan masalah atau mendorong terjadinya suatu perubahan di lingkungan eksternal negara seperti dalam kebijakan, sikap maupun tindakan yang dilakukan oleh negara lain. Penjabaran tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan luar negeri selalu ditujukan untuk wilayah eksternal negara dan dilakukan untuk mencapai tujuan. Holsti membagi kebijakan luar negeri menjadi empat komponen, yaitu (1) orientasi kebijakan luar negeri; (2) peran nasional; (3) tujuan; dan (4) tindakan. (Holsti, 1981)

Kebijakan luar negeri berbeda dengan politik internasional. Kebijakan luar negeri adalah respon atau tindakan suatu negara yang ditujukan untuk seluruh aktor yang berada di luar wilayah teritorial negara. Sementara itu, politik internasional adalah aktivitas saling merespon antar negara yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri satu sama lain.

Strategi kebijakan luar negeri akan berkaitan dengan masukan dan hasil. Masukan untuk memutuskan strategi kebijakan luar negeri adalah kondisi eksternal dan internal negara yang kemudian diproses dengan cara memahami kondisi-kondisi tersebut dan dipadukan dengan keinginan untuk mencapai tujuan negara, dengan kata lain strategi kebijakan luar negeri merupakan mobilisasi dan upaya yang nyata untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Tujuan dalam kebijakan luar negeri menurut Holsti adalah suatu gambaran keadaan peristiwa yang akan terjadi di masa depan dan rangkaian kondisi di kemudian hari yang ingin diwujudkan oleh pemerintah dengan cara membuat kebijakan luar negeri, menggunakan pengaruhnya di luar negara dan dengan mengubah atau mendukung sikap negara lain. Lebih lanjut, Holsti menggolongkan tujuan kebijakan luar negeri menggunakan kombinasi tiga kriteria yaitu :

- (1) *Value* sesuatu yang menjadi tujuan bagi para pembuat kebijakan
- (2) Jangka waktu yang diperlukan negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri
- (3) Tuntutan yang diajukan untuk negara lain

Berdasarkan penggolongan tujuan berdasarkan tiga kriteria di atas, maka selanjutnya tujuan kebijakan luar negeri dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu : (a) kepentingan dan nilai inti; (b) tujuan jangka menengah dan (c) tujuan jangka panjang universal.

a. Kepentingan dan Nilai Inti

Segala jenis kepentingan yang untuk mencapainya kebanyakan orang akan bersedia melakukan berbagai macam upaya serta pengorbanan yang besar. Nilai dan kepentingan ini biasanya dikemukakan dalam bentuk asas-asas pokok kebijakan luar negeri dan menjadi keyakinan yang diterima masyarakat tanpa sikap kritis.

Kepentingan dan nilai inti ini merupakan tujuan jangka pendek, karena tujuan lain tidak dapat dicapai apabila unit politik yang mengejanya tidak dapat mempertahankan eksistensinya sendiri. Kepentingan dan nilai inti bagi masing-masing negara tentu tidak sama, namun kebanyakan pembuat kebijakan saat ini menempatkan kedaulatan dan kemerdekaan serta mengekalkan sistem politik, sosial dan ekonomi menjadi tujuan utama dalam kebijakan luar negeri.

Beberapa negara juga beranggapan kemampuan untuk mengendalikan negara lain termasuk dalam nilai dan kepentingan inti. Hal ini disebabkan negara lain tersebut didiami oleh penduduk yang secara etnis bersaudara dengan etnis di negaranya, mempunyai sumber daya nasional yang dapat meningkatkan kekuatan negara, ataupun merupakan ancaman besar bagi integritas teritorial negaranya sendiri. Oleh karena itu, banyak negara yang berupaya mengendalikan wilayah negara lain meskipun harus mengorbankan sumber daya yang besar.

Setelah mempertahankan kedaulatan dan wilayah, kepentingan inti yang lain adalah menjaga kesatuan etnis, agama dan bahasa. Banyak negara di dunia ini yang terbentuk dengan cara memisahkan kesatuan etnis dengan sewenang-wenang, sehingga anggota etnis yang sama harus tinggal di wilayah negara yang berbeda. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik antar negara apabila suatu negara ingin membebaskan saudara satu etnis yang dianggap sedang berada dalam penguasaan negara asing. Bagi negara yang memiliki kesatuan etnis yang terpisah-pisah, maka pemerintah menempatkan reunifikasi sebagai tujuan utama kebijakan luar negeri dan



tidak jarang memberikan nilai yang sangat tinggi sehingga bersedia menggunakan kekuatan besar untuk mencapainya.

b. Tujuan Jangka Menengah

Holsti membagi tujuan jangka menengah ke dalam tiga tipe lebih lanjut :

- Tipe pertama mencakup usaha pemerintah memenuhi tuntutan dan kebutuhan perbaikan ekonomi melalui tindakan internasional. Kesejahteraan dan perbaikan ekonomi merupakan tujuan utama banyak negara di zaman ini. Namun negara-negara tersebut tidak dapat mencapai perbaikan ekonomi apabila hanya mengandalkan kemampuan sendiri, karena sumber daya nasional masing-masing negara memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, negara harus berinteraksi dengan negara lain.
- Tipe kedua adalah meningkatkan prestise negara di dunia internasional. Terdapat pergeseran pandangan menyangkut prestise negara, yaitu di masa lalu cara utama untuk meningkatkan prestise negara adalah melalui jalur diplomatik dan unjuk kekuatan militer, namun saat ini dilakukan dengan meningkatkan industri dan bidang IPTEK. Banyak negara-negara berkembang yang melakukan pembangunan untuk meningkatkan prestisenya. Pembangunan telah menjadi salah satu tujuan nasional utama zaman ini dan negara bersedia menghabiskan banyak sumber daya untuk pembangunan.
- Tipe ketiga adalah bentuk perluasan diri atau imperialisme. Beberapa negara mengklaim wilayah negara tetangga meskipun wilayah tersebut tidak memiliki nilai strategis dan adapula negara yang tidak mengklaim wilayah namun mencari keuntungan dari negara lain seperti akses pada bahan mentah, pasar dan rute perdagangan. Selain melakukan perluasan wilayah, negara juga seringkali melakukan perluasan yang bersifat ideologis atau politik.

c. Tujuan Jangka Panjang Universal

Tujuan jangka panjang adalah rencana, impian dan pandangan mengenai organisasi politik dan ideologi sistem internasional, aturan yang mengatur hubungan dalam sistem itu dan peran negara tertentu di dalamnya, atau dengan kata lain suatu negara memiliki impian dan keinginan untuk menyebarkan ideologinya di seluruh dunia sehingga negara-negara lain juga akan mengikuti ideologi tersebut.

Perbedaan antara tujuan jangka menengah dan jangka panjang berkaitan dengan unsur waktu dan ruang lingkup. Untuk mengejar tujuan jangka menengah, negara hanya melakukan tekanan pada negara tertentu, namun untuk mengejar tujuan jangka panjang negara harus melakukan tekanan secara universal untuk membangun kembali suatu sistem internasional.

Berdasarkan pemaparan konsep tujuan kebijakan luar negeri oleh K.J. Holsti di atas, maka dapat dikatakan bahwa terdapat tujuan atau gambaran keadaan peristiwa dan kondisi di masa depan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Turki melalui kebijakannya dengan terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul. Tujuan pemerintah Turki tersebut adalah :

- Mencegah keterlibatan kelompok PKK dalam Operasi Pembebasan Mosul. Tujuan ini dapat dimasukkan ke dalam kepentingan atau nilai inti karena menyangkut dengan keamanan, integritas dan stabilitas Turki. Apabila Kelompok PKK terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul maka pengaruh serta pergerakan PKK di luar wilayah Turki akan semakin besar yang dikhawatirkan dapat membahayakan keamanan dan kesatuan negara.
- Mencegah dominasi Syiah di Mosul pasca dibebaskan dari pendudukan ISIS. Tujuan ini dapat dimasukkan ke dalam tujuan jangka menengah karena merupakan upaya pemerintah Turki untuk memperkuat pengaruhnya di Iraq. Apabila Mosul dikuasai oleh

kelompok Syiah pasca dibebaskan dari ISIS, maka Iran dapat menyebarkan pengaruhnya di Mosul karena pemerintah Iran memiliki kedekatan dengan kelompok-kelompok Syiah Iraq. Di sisi lain, sejak pasca pemerintahan Saddam Hussain, Turki dan Iran merupakan dua negara yang saling berkompetisi untuk memperkuat pengaruhnya di Iraq. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pemerintah Turki untuk memastikan Mosul tidak dikuasai oleh kelompok Syiah sebagai upaya memperkuat pengaruhnya dan mengimbangi pengaruh Iran.

#### **D. Hipotesa**

Pemerintah Turki tetap berupaya untuk terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul meskipun ditentang oleh Iraq karena pemerintah Turki memiliki dua tujuan, antara lain :

1. Turki ingin mencegah keterlibatan kelompok PKK dalam Operasi Pembebasan Mosul.
2. Turki ingin mencegah dominasi kelompok Syiah di Mosul pasca kota tersebut dibebaskan dari pendudukan ISIS.

#### **E. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui haluan politik luar negeri Turki.
2. Mengetahui hubungan bilateral antara Turki dan Iraq.
3. Menjelaskan konflik vertikal yang terjadi di Iraq antara pemerintah Iraq dengan kelompok ISIS.
4. Menjelaskan sikap pemerintah Turki dalam Operasi Pembebasan Mosul
5. Mengetahui tujuan Turki dalam Operasi Pembebasan Mosul di Iraq pada tahun 2015 sampai tahun 2016.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Pada penelitian ini penulis memberikan jangkauan dalam penelitian. Hal ini disebabkan agar mempermudah

penulis dalam melakukan penelitian. Penulis membatasi fokus penelitian hanya pada tujuan kebijakan pemerintah Turki untuk terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul sejak tahun 2015 sampai tahun 2016.

Penulis memilih jangka waktu sejak 2015 hingga 2016. Pemilihan tahun 2015 dikarenakan upaya Turki untuk terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul dimulai pada tahun 2015. Sedangkan pemilihan tahun 2016 dikarenakan pada tahun tersebut pemerintah Iraq semakin mendesak pemerintah Turki untuk menarik pasukannya dari wilayah Iraq. Oleh karena itu, meskipun hingga tahun 2017 Turki masih berupaya untuk terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul namun hal tersebut tidak termasuk dalam jangkauan penelitian penulis.

#### **G. Metode Penelitian**

Untuk melakukan penelitian maka diperlukan sebuah metode agar penelitian berjalan secara teratur dan sistematis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satu pengertian metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki. Sedangkan penelitian berarti pemeriksaan yang teliti, atau penyelidikan, atau kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. (Prastowo, 2016)

Dalam melakukan penelitian juga dibutuhkan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif dan teknik pengumpulan data kualitatif. Pada penelitian kuantitatif data dapat diperoleh melalui angket, kuesioner, observasi serta wawancara, dan teknik pengumpulan data. Sedangkan pada penelitian kualitatif data dapat diperoleh melalui observasi partisipan, *indepth interview*, dokumentasi, dan triangulasi. (Prastowo, 2016)

Berdasarkan penjelasan di atas maka pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data penelitian

kualitatif dengan menggunakan melalui data-data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber dan studi pustaka seperti buku-buku, jurnal, surat kabar dan artikel-artikel dari buku maupun internet yang berkaitan dengan skripsi.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan terdiri dari bab dengan rincian sebagai berikut :

1. **Bab I Pendahuluan.** Pada pendahuluan terdapat latar belakang yang menjabarkan inti permasalahan dan problematika dari isu yang diteliti. Kemudian rumusan masalah sebagai fokus pembatas kajian penelitian ini. Kemudian pada point selanjutnya terdapat kerangka pemikiran berisi teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis isu. Selanjutnya terdapat tujuan peneliti dalam melakukan penelitian. Kemudian terdapat metode penelitian sebagai langkah operasional penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
2. **Bab II Gambaran Politik Luar Negeri Turki.** Pada bab ini akan diuraikan profil Negara Turki politik luar negeri Turki secara umum termasuk latar belakang sejarah. Selain itu akan dipaparkan juga bentuk-bentuk kebijakan luar negeri Turki terhadap Negara Iraq.
3. **Bab III Sikap Turki dalam Operasi Pembebasan Mosul.** Pada bab ini akan dijelaskan secara singkat mengenai profil Negara Iraq dan konflik vertikal yang terjadi di Iraq antara pemerintah Iraq dengan ISIS, termasuk mengenai upaya ISIS dalam merebut berbagai wilayah dan kota di Iraq termasuk Mosul. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai Operasi Pembebasan Mosul di Iraq beserta aktor-aktor yang terlibat dan bagaimana pemerintah Turki mensikapi operasi tersebut.
4. **BAB IV Tujuan Turki dalam Operasi Pembebasan Mosul.** Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tujuan pemerintah Turki yang tetap berupaya untuk terlibat

dalam Operasi Pembebasan Mosul meskipun ditentang oleh pemerintah Iraq.

5. **Bab V Kesimpulan.** Pada bab ini akan berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi.